

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Marawi yakni suatu kota di wilayah Mindanao, Filipina. Kota ini menjadi ibu kota provinsi Lanao del Sur di Mindanao. Kota ini terletak di Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM). Dulunya menjadi ibu kota provinsi Lanao del Sur di Mindanao, kota ini dinaikkan statusnya sebagai kota di tahun 1940 dengan kepemimpinan Manuel L. Quezon.¹

Kota Marawi telah hidup dengan damai selama beberapa dekade hingga pertempuran meletus pada tahun 2017. Pertempuran tersebut terkait dengan Kelompok Abu Sayyaf (ASG), kelompok bersenjata yang ingin menguasai daerah tersebut. Sejak serangan terhadap kamp militer Buttigu, pasukan Abu Sayyaf Group (ASG) telah didukung oleh organisasi teroris Daesh (Negara Islam Suriah dan Irak).

Brenda Dianjela Chandra Wijaya berpendapat dalam studinya bahwa pertempuran di Marawi menjadi tindakan terorisme yang dilaksanakan sekelompok Abu Sayyaf dan Maute, dan merupakan hasil dari penjajahan ibukota provinsi Lanao del Sur oleh organisasi teroris. Organisasi ini berbasis di provinsi Lanao del Sur di wilayah Mindanao, Filipina selatan. Pertempuran dengan cepatnya menyebar

¹ Sinta Ayu Lestari, (2020) “ Konflik Separatis Di MMarawi Filipina Selatan Tahun 2016-2017,” *Ilmu Ilmu Sosial*, h.2

ke seluruh provinsi ketika para militan merebut gedung-gedung pemerintah dan benteng-benteng strategis lainnya.²

Kegagalan proses perdamaian di Filipina menyebabkan tumbuhnya organisasi teroris seperti Abu Sayyaf Group (ASG) dan Maute Group, yang berusaha mengubah wilayah Marawi menjadi benteng pertahanan ISIS di Asia Tenggara. Pendudukan Marawi disertai dengan kampanye propaganda ISIS yang terorganisir yang bertujuan untuk menciptakan citra kemenangan dan kekuasaan, dengan AFP menggunakan pesan-pesan protes online, selebaran, poster, radio, dan pengeras suara untuk melemahkan wacana para aktivis. Alat-alat pengiriman pesan yang lebih tradisional juga secara aktif disebarluaskan.

Konflik Marawi telah memberikan dampak yang besar terhadap wilayah tersebut. Kapasitas agen kriminal internasional telah meningkat sebagai akibat dari Pemerintah Filipina yang meremehkan ancaman teroris. Konflik ini juga telah membuat ribuan orang mengungsi dan merusak infrastruktur. Konflik ini juga telah meningkatkan risiko serangan teroris di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Indonesia, dan Malaysia.³

Filipina bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat perang melawan terorisme. Sebagai contoh, Filipina bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk memerangi organisasi teroris Abu Sayyaf.⁴ Langkah-langkah yang diambil

² Wijaya, B. (2019). *Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi*, h.2

³ Lestari, S. A, Op.Cit, h.5

⁴ Musyafa, H. A., Atthahara, H., & Hakim, L, *Op.Cit*, h.3

oleh negara-negara adalah penting dan harus ditangani seprofesional mungkin, bekerja sama dengan komunitas internasional dan tanpa melibatkan negara asing.

Filipina juga berupaya memperkuat keamanan dalam menanggapi ancaman teroris di Marawi. Hal ini dikarenakan Filipina dikenal sebagai salah satunya negara di Asia Tenggara yang militan ISIS telah membuat terobosan di dalam dan luar negeri, dan sejak ISIS masuk ke Filipina, kelompok-kelompok separatis lokal, terutama di bagian selatan, telah berusaha untuk menjauhkan ISIS dari pemerintah Filipina dan membantu menciptakan sebuah negara Islam baru di Marawi. Mereka ingin membantu menciptakan negara Islam baru di Marawi. Karena pemerintah Filipina adalah sumber dukungan penting bagi ISIS dan mereka ingin membantu ISIS mendirikan negara Islam baru di Marawi. Pada awal 2017, mereka mulai mengorganisir serangan di berbagai wilayah di Filipina selatan.

Pemerintah Filipina merespons dengan meluncurkan operasi militer pada awal tahun 2017. Operasi militer awal hanya bertujuan untuk menangkap Hapilon, yang ketika itu memimpin kelompok ISIS di Filipina selatan. Tetapi, militer Filipina mendapat perlawanan dari sekelompok paratis lokalnya yakni ASG dan Maute. Kedua kelompok itu sukses melakukan penekanan pada Pemerintah Filipina dan Presiden Duterte mengumumkan darurat militer di Mindanao.

Presiden Duterte juga memerintahkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) agar merebutkan kembali distrik Marawi yang berpenduduk mayoritasnya Muslim. Ini adalah bagian dari program pengamanan AFP, yang bertujuan untuk menargetkan kelompok-kelompok lokal yang terkait dengan ISIS sekaligus

mencegah kelompok-kelompok lainnya. Program ini bertujuan untuk mencegah serangan yang dapat membahayakan warga sipil setempat. Presiden Duterte juga memerintahkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) agar merebutkan kembali daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam di Marawi sebagai bagian dari program pengamanan AFP.

Pengamanan yang dilaksanakan AFP ditujukan dalam menargetkan kelompok lokalnya yang terkait dengan ISIS. Sekuritisasi ini dilaksanakan agar mengurangi serangan yang bisa berbahaya bagi warga sipil lain. Presiden Duterte memanfaatkan isu terorisme menjadi platform dalam penyelesaian masalah Marawi. Pemerintah Filipina tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Indonesia. Pasukan asing dari negara-negara tetangga juga berpartisipasi dalam serangan Marawi. Operasi keamanan Pemerintah Filipina berhasil dan Hapilon terbunuh dalam operasi militer di Marawi.

Selain itu, sebagai bagian dari rencana keamanannya, Presiden Duterte memerintahkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) untuk merebut kembali daerah mayoritas Muslim di Marawi, dengan tujuan keamanan AFP adalah untuk menargetkan kelompok-kelompok yang terkait dengan ISIS di daerah tersebut. Kehadiran pasukan keamanan ini dimaksudkan untuk meminimalkan serangan yang bisa berbahaya bagi warga sipil lain. Presiden Duterte memanfaatkan terorisme menjadi platform dalam penyelesaian masalah Marawi. Pemerintah Filipina tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Indonesia. Pasukan asing dari negara-negara tetangga juga berpartisipasi dalam serangan Marawi. Hal ini jelas membantu Pemerintah Filipina

dalam menyelesaikan masalah di Filipina selatan. Tewasnya Hapilon dalam operasi militer di Marawi merupakan sebuah keberhasilan bagi upaya keamanan Pemerintah Filipina.

Sekelompok paratis lokalnya yang telah berkembang di Filipina kecenderungan punya keyakinan yang bertentangan dengan negara. Mereka juga mengklaim sebagai wakil Tuhan dan oleh karena itu menganggap mereka yang berpandangan yang berbeda dengannya menjadi musuh atau lawan. AFP, yang memimpin serangan di Malawi, membutuhkan peran organisasi lokal dan individu Muslim Malawi dalam mengatasi permasalahan ini. Ketika itu, AFP bekerja sama dengan berbagai Muslim Malawi untuk melawan ekstremisme. Dalam memerangi terorisme, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan militer. Umat Islam yang terlibat dalam kontra-terorisme ditanamkan nilai keIslaman, yang terdorong dari nilai nasionalisme Filipina. Pada sosialisasi nilai keIslaman, dasar nasionalisme etnis tidak boleh dilupakan untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok separatis baru.

Dengan menggunakan jaringan diaspora Islam, ISIS perlahan-lahan menarik diri dari daerah-daerah intinya di Irak dan Suriah dan pengalihan fokus ke daerah lainnya yakni Eropa, Afrika dan Asia Tenggara. Terorisme akan terus terjadi di semua wilayah di dunia. Filipina telah mengadopsi undang-undang anti-terorisme pada tahun 2020, tetapi perlawanan dari berbagai kelompok ekstremis telah menyulitkan upaya untuk merespons insiden terorisme di negara ini. Kebutuhan akan undang-undang anti-terorisme dijelaskan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut dapat mengurangi atau mengakhiri serangan teroris di

Filipina. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Diperlukan strategi kontra-terorisme bersama dengan militer. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga merupakan sarana integrasi nasional dan landasan identitas nasional dan kebangsaan.⁵

De-radikalisasi adalah sebuah pilihan yang tersedia bagi negara-negara (termasuk Filipina) untuk memerangi praktik-praktik dan ideologi agama dan politik radikal. Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk menciptakan masyarakat dengan pandangan yang lebih moderat dan bukan radikal.⁶ Radikalisme adalah ideologi yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau menghancurkan sistem sosial secara fundamental. Radikalisme menyerukan transformasi besar-besaran pada semua aspek negara dan masyarakat. Kaum radikal percaya jika perencanaan yang mereka gunakan ialah perencanaan yang ideal. Asosiasi dengan radikalisme sering kali didasarkan pada pemahaman agama yang sempit dan megebom sistem adalah hal yang umum. Sikap ekstrem ini dipupuk dalam lingkungan kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan ketidakadilan.⁷

Pada tahun 2019, Filipina secara resmi mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah dan Mengatasi Ekstremisme Kekerasan (NAP PCVE). Langkah ini diambil oleh Pemerintah Filipina sebagai respon atas krisis ISIS di Marawi pada tahun 2017. NAP PCVE bekerja sama dengan para pemuka agama di Filipina untuk

⁵ Poltak Partogi Nainggolan, *Op. Cit*, h.5

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). Deradikalisasi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deradikalisasi>.

⁷ *Ibid*

memberantas ekstremisme dari generasi muda, yang merupakan target rekrutmen utama kelompok teroris. Selain pelaksanaan program-program tersebut, Pemerintah Filipina juga melaksanakan program Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) dengan masyarakat yang terkena dampak konflik yang tangguh.

Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Filipina, mengakui peran organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam Deklarasi Manila tentang Penanggulangan Peningkatan Radikalisasi dan Ekstremisme dengan Kekerasan. Deklarasi ini juga membayangkan memerangi radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada munculnya semua bentuk terorisme, khususnya melalui langkah-langkah untuk mencegah radikalisme, pendanaan, perekrutan, dan mobilisasi individu ke dalam kelompok-kelompok teroris.

Deklarasi Manila tentang Melawan Meningkatnya Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan membayangkan penggunaan kekuatan dan tindakan hukuman sebagai bagian dari strategi kontra-terorisme yang komprehensif. Deklarasi ini juga membayangkan rehabilitasi individu yang teradikalisasi dan teradikalisasi melalui program rehabilitasi untuk mencegah 'kekambuhan', yaitu kembali ke kegiatan ekstremis atau teroris. Strategi ini juga memberikan penekanan kuat pada pencegahan radikalisme.

Dalam kerangka ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dibahas berkaitan dengan upaya kontraradikalisme dalam memerangi gerakan ISIS di wilayah Marawi, Filipina. Penelitian ini penting

mengingat pentingnya intervensi pemerintah dalam menangani masalah-masalah domestik. Bagian lain di dunia juga menghadapi tantangan keamanan nasional dan regional. Filipina dapat menjadi studi kasus yang berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi ancaman serupa. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk membantu negara lain mengembangkan kebijakan kontra-radikalisasi. Studi ini juga memberikan informasi rinci yang dapat digunakan untuk kebijakan kontra-radikalisasi yang lebih baik di Filipina dan memberikan kontribusi penting bagi upaya global untuk melawan ekstremisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar persepsi dan latar belakangnya di atas, pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini yaitu : Bagaimana kebijakan stigmatisasi Filipina terhadap gerakan ISIS di Malawi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah supaya menganalisis kebijakan dan usaha Filipina dalam melawan gerakan ISIS di Marawi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan bahan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut, asalkan teorinya relevan dengan topik penelitian.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk seberapa penting menjaga perdamaian dunia.

1.4 Penelitian Terdahulu

1.4.1 Penelitian yang dilakukan oleh Poltak Poltagi (2017).⁸ Serangan militer yang dilakukan oleh koalisi Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan koalisi Rusia, Iran, dan rezim Bashar al-Assad telah melemahkan posisi ISIS di Suriah dan Irak, dan ISIS telah membuat 'kekhalifahan jarak jauh' di Asia Tenggara sebagai pilihan dan basis perlawanan baru dan perjuangan melawan kekhalifahan global. ISIS telah menciptakan 'kekhalifahan jarak jauh' di Asia Tenggara. Penelitian ini menjelaskan apakah kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara hanyalah sebuah wacana atau sebuah kenyataan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama satu tahun, dari April 2016 hingga pertengahan 2017, di luar Indonesia, di Filipina selatan dan di daerah Mian Gas, Sebatiq, dan Nunukan, yang terkait dengan kegiatan Kelompok Abu Sayyaf dan organisasi lain yang terkait dengan ISIS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk tinjauan literatur serta wawancara mendalam dengan para ahli, penegak hukum dan pejabat kontra-terorisme, polisi dan

⁸ Poltak Partogi Nainggolan. (2017). The ISIS Caliphate in Southeast Asia, Is It Merely A Discourse or A Reality? *Politica*, 8(2), 205–230.

militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara bukan hanya wacana, namun sedang diperebutkan dan dibangun melalui perjuangan dengan negara-negara dan organisasi-organisasi saingan di dalam dan di luar kawasan.

1.4.2 Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Amin (2018).⁹ Bentrokan di Kota Marawi di awal tahun 2017 merupakan pembuktian nyata dari ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi teroris ISIS terhadap Asia Tenggara. Sesudah terjadi banyaknya kekalahan dan hilangnya kawasan di Timur Tengah, Asia Tenggara diperkirakan akan menjadi target baru bagi rencana ISIS untuk memperluas kekhalifahannya dengan kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Negara Asia Tenggara bersegera pengambilan langkah menarik untuk memperkuat kerja sama keamanan regional sebagai bagian dari upaya keamanan mereka. Artikel ini membahas kemungkinan Asia Tenggara menjadi target baru kebangkitan ISIS dan cara negara Asia Tenggara merespons ancaman ini: Artikel ini berargumen jika penguatan kerja sama keamanan regional oleh negara Asia Tenggara bisa dipahami menjadi upayanya untuk melawan pengaruh ISIS yang terus berkembang di wilayah ini.

⁹ Khoirul Amin, (2018), “ ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS”, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 2, Oktober.

1.4.3 Penelitian yang dilakukan oleh Brenda (2019).¹⁰ Pertempuran Marawi yaitu sebuah aksi terorisme yang dilaksanakan oleh sekelompok militan pemberontak Abu Sayyaf dan klan Maute dari organisasi teroris ISIS yang menduduki distrik Marawi, ibu kota provinsi Lanao del Sur di Mindanao selatan, Filipina. Pertempuran dengan cepatnya tersebar ke seluruh kota ketika para militan mengambil alih benteng-benteng strategis, termasuk gedung-gedung pemerintah; pengepungan selama lima bulan dari 23 Mei 2017 sampai 23 Oktober 2017 menandai meningkatnya ancaman ekstremisme di Asia Tenggara. Sebagai organisasi teroris, ASEAN dituntut untuk memainkan peran kunci dalam mencegah dan melawan terorisme lintas batas. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi respons ASEAN kepada sekuritisasi terorisme setelah Pertempuran Marawi. Konvergensi antara pemberontakan dan terorisme membutuhkan strategi kontra-pemberontakan dan kontra-terorisme yang terkait erat dengan unsur-unsur militeris. Untuk hal ini, hambatan kerja sama antara organisasi teroris ASEAN akan mempengaruhi respons ASEAN terhadap strategi kontra-pemberontakan dan kontra-terorisme setelah Pertempuran Marawi. Untuk mengilustrasikan hal ini lebih lanjut, penelitian ini mempergunakan Copenhagen School dari Barrie Buzan dalam menjabarkan keamanan dan Accidental Guerrillas dari David Kilcullen agar menjelaskan konvergensi antara pemberontakan dan

¹⁰ Brenda D'Angela Candra Wijaya, (2019), " Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi, *Journal.umyY.ac.id*.

terorisme. Studi ini juga menggunakan Emmers dalam menganalisis respon ASEAN berdasar kontur keamanan menjadi organisasi teroris.

1.4.4 Penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2023).¹¹ Terorisme meningkat dengan cepat di Indonesia dan Filipina. Penyadapan digunakan sebagai metode untuk menyelidiki teroris. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahui dan mengkajikan apakah penyadapan pada tersangka terorisme di bawah Undang-Undang Terorisme telah sesuai dengan hak asasi manusia dan mengapa penyadapan terhadap tersangka terorisme di Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Filipina. Metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan normatif hukum dan metode komparatif. Sumber data berupa data sekunder yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Penyadapan tidak diatur dengan khusus pada UU, tetapi untuk praktiknya menimbulkan kontroversi terkait prosedur penyadapan. Penyadapan menjadi masalah karena melanggar hak privasi warga negara. Untuk membuktikan bahwa penyadapan dimaksudkan untuk menjamin perlindungan, penyadapan harus dilaksanakan berdasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk masalah teknis dan perizinan. Penyadapan di Indonesia relatif memakan waktu karena jaringan teroris di Indonesia tidak terkonsentrasi di satu wilayah.

1.4.5 Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Ayu Lestari (2017). Penelitian ini mengkaji konflik separatis di Marawi, Filipina selatan, antara tahun 2016 dan

¹¹ Shinta Dewi Kumalasari, (2023), ‘‘ Penyadapan Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia dan Filipina,’Justitia Ex Pax, Vol.39, No.1

2017. Gagalnya proses damai di Filipina menyebabkan peningkatan terorisme terhadap ASG dan Kelompok Maute, yang berusaha didirikan kawasan di Marawi menjadi benteng pertahanan ISIS di Asia Tenggara, dan upayanya ini berujung pada pertempuran dengan Angkatan Darat Filipina. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mendeskripsikan bagaimana konflik separatis berkembang di Kota Marawi, Filipina Selatan. Penelitian ini bermetode kualitatif melalui wawancara menjadi data primer dan tinjauan pustaka menjadi data sekunder. Untuk penelitian ini, penulis dengan teori konflik dan teori pemetaan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muslim Moro merasakan terdiskriminasi oleh pemerintahan Filipina atas dasar agama mereka, bahwa pengalaman buruk di masa lalu sudah terdorong pembentukan kelompok-kelompok separatis Islam di Filipina, dan ideologi ISIS telah menyusup pada kelompok ASG dan Maute. Survei ini menemukan hal tersebut.

1.4.6 Penelitian yang dilakukan oleh ¹².Aspek negatif dari radikalisme adalah embrio dari terorisme. Aspek negatif dari radikalisme adalah sikap mencari perubahan revolusioner secara total dengan kekerasan dan tindakan militan. Inisiatif selain koreksi melalui hukum pidana bisa jadi usaha yang ampuh untuk mengatasi ekstremisme. Usaha selain koreksi berdasar peraturan yang terdapat di Indonesia adalah program deradikalisasi, tetapi fluktuasi insiden

¹² Pratama Maulidyawanto, Hernawati RAS, and Nandang Sambas, "Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 155–69, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.301>.

teroris di Indonesia menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh lembaga terkait tidak efektif. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur yang berkaitan dengan pelaksanaannya program deradikalisasi dan kurangnya aturan yang jelas berkaitan dengan program deradikalisasi.

1.4.7 Penelitian yang dilakukan oleh Saefuddin Zuhri¹³. Terorisme adalah ancaman nyata bagi Indonesia dan dunia saat ini. Kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS telah bangkit atas nama Islam. Kekhalifahan Islam adalah cita-cita yang dicita-citakan oleh kelompok-kelompok ini untuk menyatukan para pemimpin Islam di seluruh dunia. Negara-negara yang menganut ideologi negara-bangsa telah memposisikan dirinya menjadi kelompok ekstremis, termasuk Indonesia. Pemerintahan Indonesia, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menanggulangi terorisme ekstremis dengan kebijakan deradikalisasi. Dengan latar belakang itu, tujuan dari tulisan ini yaitu supaya membahas deradikalisasi dari perspektif politik. Secara khusus, tulisan ini mengkaji konsep dan implementasi program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT. Apakah benar pelaksanaannya program deradikalisasi merubah spektrum politik seorang dari ekstremis menjadi non-ekstremis, dan bagaimana spektrum politik mereka yang menjadi non-ekstremis? Tulisan ini memperlihatkan jika pelaksanaannya

¹³ Saefudin Zuhri, "Kebijakan Deradikalisasi Terorisme Oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2017): 7.

program deradikalisasi oleh BNPT tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan program itu tidak merubah spektrum politik kelompok target.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Kekhalifahan ISIS Di Asia Tenggara, Sekadar Wacana Atau Realitas?	Penelitian dengan pendekatan kualitatif, selain dengan studi kepustakaan, juga mewawancara lebih dalam dengan para ahli, aparat penegak hukum dan anti-teroris, kepolisian serta militer. Teori/Konsep: Radikalisasi	Penelitian menunjukkan bahwa kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara tidak hanya retorika, namun sedang dibangun sambil berperang dengan negara-negara dan organisasi yang bermusuhan di dalam dan di luar kawasan.
2	ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS	Metode: Kualitatif Deskriptif Teori/Konsep: Analisis Jurnal Penelitian dengan Teori Kerjasama Keamanan Kawasan	Artikel ini berargumen bahwa ISIS bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara menjadi bagian dari terorisme global dan bahwa kerja sama keamanan regional yang dikembangkan oleh negara Asia Tenggara bisa dipahami menjadi usaha untuk melawan penyebaran ISIS di wilayah tersebut.

3	<p>Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi</p>	<p>Metode: Kualitatif Deskriptif Teori/Konsep: penelitian ini dengan Copenhagen School dari Bary Buzan dalam menjabarkan sekuritisasi serta Accidental Guerilla dari David Kilcullen supaya mengemukakan konvergensi insurgensi dan terorisme. Penulis juga merujuk pada Emmers dalam menganalisis respon berdasar kontur keamanan ASEAN menjadi organisasi regional.</p>	<p>Bentrokan bersenjata antara kelompok Abu Sayyaf dan klan Maute di Malawi telah memberikan perspektif baru untuk negara ASEAN terkait skala dan cakupan ancaman teroris. Selama lima bulan pertempuran, ISP menduduki posisi strategis dan menggunakan taktik yang sama dengan pejuang gerilya, termasuk membangun jalan dan menempatkan karung pasir di gorong-gorong. Mereka membangun gorong-gorong, menyandera dan membebaskan tawanan perang Malawi. Perang Malawi adalah subjek yang menarik untuk dipelajari karena menggambarkan evolusi perang gerilya. Hal ini karena Pertempuran Marawi menggambarkan</p>
---	--	--	--

		<p>evolusi ancaman teroris di wilayah Asia Tenggara, terkhusus selama era organisasi teroris JI: JI punya rantai komando yang terpusat dan memerlukan komunikasi yang konstan untuk melaksanakan operasi. ISIS, di sisi lain, dapat berkoordinasi melalui Telegram, sebuah grup obrolan media sosial yang lebih terdesentralisasi. Selain itu, sementara JI beroperasi secara sembunyi-sembunyi, ISIS melakukan propaganda yang luas melalui video, pidato, dan serangan publik. Konflik Malawi adalah tipikal insiden teroris di Asia Tenggara, terutama selama era JI. Konflik Marawi memperlihatkan karakteristik kombinasi antara pemberontakan dan terorisme.</p>
--	--	--

4	Penyadapan Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia dan Filipina	Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum perbandingan.	Penyadapan harus dilaksanakan berdasar pada prinsip hak asasi manusia, termasuk persyaratan teknis dan perizinan, dan harus menunjukkan bahwa penyadapan dilakukan untuk perlindungan. Di Indonesia dan Filipina, penyadapan berjalan relatif lambat karena jaringan teroris di Indonesia tidak terkonsentrasi di satu wilayah.
5	Konflik Separatis Di Marawi Filipina Selatan	Untuk penelitian ini penulis dengan teori konflik dan teori pemetaan konflik.	Survei tersebut mengungkapkan bahwa Muslim Moro merasakan terdiskriminasi oleh pemerintahan Filipina dikarenakan agama mereka. Menurut survei tersebut, ada tiga alasan utama untuk hal ini: (i) mereka merasakan terdiskriminasi oleh pemerintahan Filipina sebab

			<p>agama mereka;</p> <p>(ii) pengalaman buruk di masa lalu sudah menyebabkan pembentukan kelompok separatis Islam di Filipina; dan (iii) ideologi ISIS telah menyusup pada kelompok ASG dan Maute.</p> <p>(iii) Ideologi ISIS telah menyusup ke dalam kelompok ASG dan Maute. Pengalaman buruk di masa lalu telah menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok Islam separatis di Filipina.</p> <p>(v) Ideologi ISIS telah menyusup ke dalam kelompok ASG dan Maute.</p>
6	<p>Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia</p>	<p>Metode: Kualitatif Deskriptif melalui Analisis Jurnal</p> <p>Teori/Konsep: Aturan Presiden No. 46/ 2010 terkait Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan aturan Pemerintahan No. 77/ 2019 terkait</p>	<p>Aspek negatif dari radikalisme adalah embrio dari terorisme. Aspek negatif dari radikalisme adalah sikap mencari perubahan revolusioner total dengan kekerasan dan tindakan militan. Dekriminalisasi</p>

		<p>Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.</p>	<p> mungkin merupakan inisiatif yang terampuh untuk memerangi radikalisme. Langkah-langkah dekriminalisasi berdasar peraturan yang terdapat di Indonesia adalah program deradikalisasi, tetapi fluktuasi insiden teroris di Indonesia menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh lembaga terkait tidak efektif. Hal ini dikarenakan berkurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai dalam melaksanakan program deradikalisasi dan peraturan yang tidak jelas mengenai program deradikalisasi.</p>
7	<p>Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik</p>	<p>Metode: Kualitatif Deskriptif Teori/Konsep:</p>	<p>Studi ini menemukan bahwa program stigmatisasi yang dilakukan oleh</p>

		Tulisan ini dengan spesifik mengambil studi sebuah konsep dan pelaksanaannya program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini.	BNPT tidak signifikan. Hal ini sebab spektrum politik kelompok sasaran tidak berubah sebagai hasil dari program itu.
--	--	--	--

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Radikalisme dan Deradikalisasi

Radikalisme bersumber kata Latin radix, yang bermakna akar. Ini maknanya berpikiran lebih dalam tentang suatu hingga ke akar.¹⁴

Kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary mengatakan;¹⁵

Radikalisme adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa perubahan ekstrem pada sosial maupun politik harus terjadi. Radikalisme adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa perubahan ekstrem pada sosial maupun politik harus dilakukan.

Radikalisme adalah ideologi yang bertujuan untuk mengubah, mentransformasi, dan menggulingkan sistem sosial secara fundamental. Radikalisme menyerukan transformasi total semua aspek negara dan masyarakat. Kaum radikal percaya jika rencananya adalah perencanaan yang ideal. Asosiasi dengan radikalisme sering kali

¹⁴ Maulidyawanto, P., RAS, H., & Sambas, N. (2023). Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), h.155

¹⁵ *Ibid*

berdasar dalam pemahaman agamanya yang menyempit dan mengarah untuk sikap berlebihan yang tumbuhnya bersama rezim. Sikap ekstrem seperti itu dipupuk dalam lingkungan kemiskinan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan.¹⁶

Menurut Azmardi Azra dalam Abdul Munip, keberadaan ekstremisme bersumber dari:¹⁷

- a. Pemahaman agama yang literal dan terpecah-pecah pada ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai contoh, konsep jihad sering disalahartikan oleh gerakan-gerakan ekstremis. Alwi Shihab berpendapat bahwa beberapa orang mengaitkan Islam dengan ekstremisme karena kesalahan persepsi tentang makna dan fungsi jihad dalam Islam. Adalah sebuah kesalahan jika berpikir bahwa jihad identik dengan mengangkat senjata. Secara etimologis, jihad berarti usaha yang tidak kenal lelah. Pemahaman jihad yang sempit seperti itu mengarah pada ekstremisme.
- b. Salah membaca sejarah Islam dan terlalu mengidealkan Islam. Hal ini dapat dilihat pada pandangan dan gerakan Salafi yang munculnya di Jazirah Arab untuk akhir abad ke-18 dan terus menyebar hingga saat ini, terutama yang sangat radikal seperti Wahabi.
- c. Kendala politik, sosial dan ekonomi. Ketika momen yang sama, kekacauan dan kebingungan sosial-budaya serta ekses globalisasi merupakan faktor tambahan yang penting dalam kemunculan kelompok-kelompok ekstremis.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h.284

Reformasi politik di Indonesia pada kenyataannya telah berkontribusi pada munculnya kelompok-kelompok Islam yang sangat fundamentalis dan dalam beberapa kasus menjadi radikal.

De-radikalisasi, yang dibentuk dengan menambahkan akhiran 'de' yang berarti 'mengurangi' pada istilah radikalisasi, mengacu pada proses, metode dan tindakan 'de-radikalisasi' di balik istilah radikalisasi. Dengan kata lain, deradikalisasi adalah upaya untuk mengurangi kegiatan ekstremis dan menetralkan ideologi ekstremis, dengan sasaran mereka yang terlibat dalam terorisme, simpatisan, dan masyarakat umum yang terpapar ideologi ekstremis teroris.¹⁸

Deradikalisasi mengacu pada upaya untuk mengubah mereka yang terpengaruh oleh ideologi ekstremis dari keyakinan dan ideologi ekstremis ke keyakinan dan ideologi non-ekstremis dengan menggunakan pendekatan agama, sosial, budaya, dan pendekatan interdisipliner lainnya. Sebaliknya, deradikalisasi mengacu pada kognitif yang berubah ataupun upaya untuk memoderasikan pikiran dan keyakinannya. Oleh karena itu, deradikalisasi merupakan program jangka panjang. Program ini berlangsung di tingkat ideologis bertujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman agamanya teroris.¹⁹

Menjadi sebuah program aksi, deradikalisasi bisa berupa usaha untuk mengidentifikasi, merehabilitasi, mendidik ulang, dan mensosialisasikan kembali individu dan sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh ideologi ekstremis

¹⁸ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme*, Daulatpress, Jakarta, 2017, hlm. 103.

¹⁹ *Ibid*, h.104

melalui pengedepanan prinsip pemberdaya, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kesetaraan. Tujuan keseluruhan dari deradikalisasi ialah untuk memotivasi para teroris dan kelompok kekerasan agar meninggalkan aksi dan kegiatannya terorisme mereka. Terkhusus, tujuan-tujuan tersebut meliputi:²⁰

1. teroris meninggalkan terorisme dan kekerasan.
2. Ekstremis mendukung pandangan moderat dan toleran
3. Ekstremis dan teroris pendukung program negara untuk pembangunan bangsa.

Menurut Fatali Asaf Moghaddam dalam Fawzi,²¹ ada beberapa tahap radikalisasi individu, yang pertama ialah tahap pra-radikalisasi. Untuk tahap ini, individu, sebagai anggota kelompok sosial, mulai meragukan apakah dia diperlakukan secara adil oleh pihak berwenang dan pemerintah, yang mengarah pada krisis identitas. Tahap kedua ialah tahap mengidentifikasi dirinya. Dalam tahap ini, individu merasakan butuh dalam menemukan tempat di mana ia dihargai menjadi manusia, dilindungi jadi warga negara dan bisa mengekspresikan pandangannya tanpa diskriminasi, yang merupakan cara untuk mengatasi perasaan ketidakadilan. Tahap ketiga adalah indoktrinasi. Pada tahap ini, mereka benar-benar meninggalkan identitas mereka sebelumnya dan beradaptasi dengan identitasnya

²⁰ *Ibid*, h.105

²¹ Ahmad Fauzi, (2021), “ Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia,” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, h. 4

yang telah diradikalisasi. Tahap terakhir dari radikalisisasi adalah jihadisasi. Untuk tahap ini, identitas dan ideologi kelompok yang teradikalisasi diadopsi sepenuhnya.

Mencegah radikalisisasi berarti identifikasi dini dan penerapan langkah-langkah pencegahan yang menargetkan kelompok-kelompok potensial dan berbagai bentuk dan varian yang terkait dengan masing-masing kelompok. Satuan Tugas Pelaksanaan Kontra-Terrorisme (CTITF) memandang deradikalisasi sebagai kebijakan bagi mereka yang terpengaruh oleh ideologi ekstremis. Tujuannya adalah untuk merehabilitasi mereka atau setidaknya melemahkan keinginan mereka untuk tidak melakukan pelanggaran..²²

Pada persepsi BNPT, istilah deradikalisasi menysasar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan terorisme dan mengacu pada upaya kelompok ekstremis untuk memoderasi ekstremisme mereka. Dalam deradikalisasi, upaya yang dilakukan adalah mengubah pola pikir ekstremis pelaku serangan teroris melalui rehabilitasi.²³

Deradikalisasi mengacu pada upaya untuk menghentikan penyebaran ekstremisme. Ekstremisme harus dicegah karena tindakan dan pemikiran individu dan kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekstremisme yang mengarahkan untuk kekerasan, perang dan terorisme paling membahayakan untuk kemanusiaan. Divisi Kontra-Terrorisme PBB menyatakan bahwa 'Mencegah radikalisisasi adalah proses meninggalkan pandangan dunia ekstremis dan sampai pada kesimpulan bahwa

²² Josefhin Mareta, (2018), Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, h.3

²³ *ibid*

penggunaan kekerasan untuk perubahan sosial tidak dapat diterima'. Namun, definisi ini berbeda dengan istilah deradikalisasi. Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk memperluas cakupan gerakan ekstremis, misalnya untuk mencegah radikalisasi anak muda yang mungkin menjadi anggota gerakan tersebut.²⁴

1.5.2 Konsep Sekuritisasi

Konsep sekuritisasi, yang diperkenalkan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, mengacu pada konsep 'referensi', 'aktor sekuritisasi', dan 'aktor fungsional'. Teori sekuritisasi menjelaskan bahwa ketika sebuah negara menyatakan suatu masalah keamanan sebagai ancaman, maka tindakan-tindakannya diarahkan untuk kelangsungan hidup warganya. Dengan kata lain, sebagai aktor kunci dalam proses sekuritisasi, negara memainkan peran penting dalam mengorganisir upaya-upaya untuk mengeliminasi kelompok-kelompok separatis regional di Malawi. Negara mengakui bahaya terorisme melalui perannya dalam mencegah dan memerangi terorisme. Negara memiliki peran dalam mendidik penduduk dan memastikan bahwa mereka memahami terorisme. Negara memiliki peran dalam mendidik dan mengendalikan masyarakat. Dengan kata lain, negara memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas ekstremisme dan terorisme. Bagi Barry Buzan, Ole Weber dan Jaap de Wilde, keamanan adalah identifikasi isu-isu politik dan non-politik tertentu yang merupakan masalah

²⁴ Syamsul Arifin & Hasnan Bachtia, (2013), Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional Radikal, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 No. 3, h.3

keamanan. Dalam banyak kasus, negara lah yang berperan dalam proses sekuritisasi; contohnya adalah operasi keamanan di Kota Marawi, Filipina pada tahun 2017 melawan ISIS yang jadi ancaman untuk masyarakat Filipina. Meningkatnya aksi terorisme di wilayah selatan Filipina mengharuskan Pemerintah Filipina untuk memperkuat perannya dalam mencegah dan memerangi aksi terorisme untuk meyakinkan warganya. Untuk itu, Pemerintah Filipina meluncurkan sebuah inisiatif di Marawi untuk memperkuat peran militer dalam memerangi terorisme dan bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan Barat.

Bagi Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, sekuritisasi menjadi identifikasi isu tertentu dalam politik ataupun non-politik yang akan jadi suatu pengagenda keamanan. Aktor yang punya peran untuk proses sekuritisasi biasanya ialah negara tersebut. Untuk hal ini, usaha sekuritisasi yang dilaksanakan oleh Filipina pada ISIS yang sudah jadi ancaman untuk masyarakat Filipina paling utama di Marawi untuk tahun 2017. Akibatnya terdapat peningkatan aksi terorisme di Filipina sebelah selatan, pemerintahan Filipina yang jadi dasarnya untuk memberi keamanan bagi masyarakat butuh peningkatan peranan dalam perlawanan dan pencegahan aksi terorisme. Maka, Pemerintahan Filipina memulai melaksanakan usaha melalui cara memperkuat peranan militer dan bekerjasama dengan negara tetangga ataupun negara barat untuk melaksanakan aksi agat ikut memerangi terorisme di Marawi.

Hal ini terbukti dari fakta bahwa Pemerintah Filipina, bersama dengan AFP, melakukan operasi kontra-terorisme di Mindanao. Mereka juga telah membantu AFP dalam perundingan damai antara Pemerintah Filipina dan organisasi separatis

Filipina, MNLF, dan dalam penangkapan milisi yang terkait dengan ISIS, termasuk ASG dan klan Maute. Pemerintahan Filipina juga mengkoordinasikan penegak hukum dan langkah-langkah kontra-ekstremisme dalam menghadapi ancaman yang berlanjut terus, paling utama di Filipina selatan. Seperti diketahui, Filipina sudah jadi tujuan utamanya untuk para pejuang asing dari Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah sesudah Irak dan Suriah kalah. Sifat terpencil dari Filipina selatan dan sikap apatis pemerintahan Filipina, dikombinasikan dengan tingkat keamanan yang sangat rendah di wilayah tersebut, membuat Filipina menjadi target strategis bagi para militan.

Tal Backer (2006) 'Terorisme dan Negara: Memikirkan Kembali Aturan Tanggung Jawab Negara' (Tal Backer, 2006) berargumen bahwa dari perspektif hukum substantif, kewajiban negara sehubungan dengan kegiatan teroris/aktor non-negara tidak berbeda secara fundamental dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya yang mengatur perilaku. Kewajiban untuk mencegah dan menahan diri dari tindakan ada dalam kaitannya dengan kewajiban hak asasi manusia, hukum lingkungan, perilaku berbahaya terhadap orang asing, dan bentuk-bentuk yang berpotensi berbahaya dari asosiasi asing/aktivitas teroris dengan konsekuensi internasional.²⁵

Poltak Nainggolan (2019), dalam studinya tentang ancaman ISIS/DAESH di Indonesia, menganalisis masalah terorisme dari pendekatan hubungan internasional. Karena teroris dianggap sebagai aktor non-negara dalam hubungan

²⁵ Tal Becker. (2006) *Terrorism and The State Rethinking the Rules of State Responsibility*. Oxford & Portland, Oregon. Pp. 170 - 172

internasional, analisis ini memungkinkan adanya diskusi tentang aktor negara, yang merupakan fokus penting bagi kaum realis dan juga pluralis dalam studi hubungan internasional. Terorisme dan dinamika keamanan dalam hubungan internasional juga terkait dengan keamanan manusia. Selain itu, mengelaborasi konsep keamanan manusia berarti negara sebagai aktor internasional mendefinisikan dan menangani isu-isu yang lebih luas dan komprehensif seperti keberlanjutan negara, kemakmuran, dan martabat terhadap potensi ancaman terorisme sebagai aktor non-negara.²⁶

1.5.3 Kebijakan Publik terkait Pertahanan dan Keamanan

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik mengacu pada seperangkat pilihan yang saling terkait yang dibuatkan oleh badan dan pejabat pemerintahan dalam bidang yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan perkotaan.²⁷

Untuk membahas peran pemecahan masalahnya, William N. Dunn (1994:24) beropini jika tahapan dasar memecahkan masalah publik melalui kebijakan ialah :²⁸

- a. identifikasi masalah kebijakan
- b. perumusan kebijakan

²⁶ Ibid

²⁷ Budi Pramono dan Lukman Yudho Prakoso, (2022), “ Antisipasi Pertahanan dan Keamanan Cyberpolitycs Dengan Artificial Intelligence”, *Jurnal Review Politik*, h.3

²⁸ Ibid

- c. Pengadopsi kebijakan
- d. Pengimplementasi kebijakan
- e. evaluasi kebijakan.

Pada setiap tahap perumusan kebijakan, ketergantungan antara satu isu dengan isu lainnya harus diperhitungkan. Kebijakan adalah tindakan dari sekumpulan aktor (manajer, kelompok, organisasi pemerintah) atau pelaku dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu, sebuah kebijakan harus mengandung tiga elemen:²⁹

1. Mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik dan strategi untuk berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai masukan untuk memastikan bahwa taktik dan strategi tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik.

Oleh karena itu, kebijakan publik adalah tentang pemerintah dan organisasi pemerintah yang membuat pilihan-pilihan yang mereka anggap terbaik untuk menemukan solusi yang tepat, cepat, dan akurat terhadap masalah yang dihadapi oleh publik.³⁰

1.6 Metodologi Penelitian

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

1.6.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penulisan artikel ini. Metode penelitian ini bersifat naturalistik dan sering digunakan sebagai alat penting ketika menyelidiki keadaan alamiah dari suatu objek dan peneliti cenderung menciptakan makna daripada menggeneralisasi tentang topik yang diteliti.³¹

1.6.2 Teknik Analisis Data

Penganalisisan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menganalisis deskriptif, yang dengan tujuan agar memberikan gambaran dengan sistematis, faktual dan akurat terkait fakta serta hubungannya dengan fenomena yang dikaji. Penganalisisan dilaksanakan sesudah data yang diperlukan untuk penelitian terkumpul.

Berdasarkan data itu, proses analisis penelitian ini dilaksanakan dengan langkah yakni antara lain dengan membaca, menelaah, dan menganalisis data menurut Miles dan Huberman:³²

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data meliputi data yang dikumpulkan melalui riset internet dan studi literatur. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dalam mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

³¹ Ar Rasyid, A. M., & Rijal, N. K, h. 23

³² Rani, R., Sao'dah, Sri, S., & Irene, H. (2021). *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Issue April). Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, h.20

2. Reduksi data.

Reduksi data yaitu sebuah bentuk menganalisis di mana data yang berlebihan diklasifikasikan, dikategorikan, dimanipulasi, dibuang, dan diorganisasikan sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi.

3. Penyajian data.

Penyajian data ialah aktivitas pengelompokan data yang sudah direduksikan. Pengelompokan data dilaksanakan melalui label dan alat bantu lain.

4. Penarikan kesimpulan (validasi).

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas menganalisis yang menitikberatkan untuk menafsirkan terhadap data yang tersajikan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis internet dan tinjauan literatur. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Penelitian ini merangkum upaya Filipina untuk mengurangi stigmatisasi identitas di Malawi.

1.6.4.2 Batasan Waktu

ISIS baru mulai terbentuk pada tahun 2013, dan studi ini didasarkan pada periode awal 1990-an ketika ISIS muncul sebagai gerakan teroris yang mengancam negara di Malawi. Studi ini didasarkan pada periode ketika ISIS memulai kampanyenya di Malawi. Isu-isu utama Penelitian ini didasarkan pada teori konstruktivis dengan menggunakan empat tipologi identitas yang diusulkan oleh Alexander Wendt:

1. Identitas pribadi atau organisasi tidak serta merta menciptakan identitas. Jenis identitas ini memiliki keuntungan seperti keamanan, pengakuan identitas oleh aktor lain, pengembangan aspirasi hidup dan pemeliharaan identitas.
2. Identitas Type. Identitas jenis ini dipengaruhi oleh ideologi politik dan agama.
3. Identitas peran, perilaku dalam aktivitas hubungan internasional mempengaruhi pembentukan identitas ini dan reaksi dari aktor lain.

Identitas kelompok, terdapat hubungan antar aktor negara yang membentuk identitas bersama. Identitas ini menciptakan kesadaran dan emosi bersama yang membentuk perilaku kolektif yang khas. Hubungan antar aktor negara dibentuk oleh rasa saling ketergantungan antar aktor.

1.7 Argumen Pokok

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori konstruktivisme terdapat 4 tipologi identitas yang dikemukakan oleh Alexander Wendt diantaranya adalah:

1. Identitas personal atau *corporate identity*, tidak ada paksaan dalam membentuk Identitas ini atau dengan kata lain Identitas ini terbentuk secara alami. Terdapat kepentingan dalam Identitas ini yaitu keamanan, diakuinya Identitas oleh aktor lain, pengembangan aspirasi hidup dan mempertahankan identitasnya.
2. Identitas tipe atau *type identity*. Adanya pengaruh ideologi politik dan agama dalam membentuk identitas ini.
3. Identitas peran (*role identity*), tindakan dalam aktivitas hubungan internasional mempengaruhi terbentuknya identitas ini. Ketika terdapat aktivitas dan mendapat respon dari aktor lain.
4. Identitas kelompok (*collective identity*). Adanya hubungan antar aktor negara yang kemudian terbentuk identitas bersama. Identitas ini menciptakan kesadaran dan perasaan bersama sehingga membentuk perilaku kelompok yang khas. Hubungan antar aktor negara dapat terbentuk ketika antar aktor memiliki rasa saling ketergantungan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penulisan ini, peneliti telah membagi artikel ini ke dalam beberapa bagian.

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	ISI
I	Pendahuluan	1.1 Latarbelakang Masalah 1.2 Rumusan Msalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Kerangka Teori 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian a. Batasan Materi Penelitian b. Batasan Waktu Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
II	Gambaran ISIS Di Marawi	2.1 Serangan ISIS di Filipina 2.2 Sikap Filipina Terhadap Gerakan ISIS 2.3 Pengaruh ISIS Bagi Masyarakat Filipina Di Marawi
III	Analisis Upaya Deradikalisasi Filipina Dalam Melawan ISIS Di Marawi	3.1 Upaya Deradikalisasi Filipina Dalam Melawan ISIS Di Marawi 3.2 Kebijakan Pemerintah Filipina Dalam Mengatasi Gerakan ISIS Di Filipina 3.3 Pusat Deradikalisasi Filipina DI Wilayah Otonomi Muslim Mindanao
IV	Penutup	1.1 Kesimpulan 1.2 Saran